



**RENCANA STRATEGIS  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA  
TAHUN 2024-2026**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai amanat undang-undang Permendagri nomer 86 Tahun 2017 maka diperlukan Rancangan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi dalam jangka 3 (tiga) tahun Rancangan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Rencana Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dituangkan ke dalam kebijakan, strategi, dan program pembangunan yang mengacu kepada Rancangan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Rancangan Perangkat Daerah ini merupakan pedoman bagi penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi.

Rancangan Perangkat Daerah disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Rancangan Rencana Strategis juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi.

Proses penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan rencana strategis, pelaksanaan forum PD rancangan akhir rancangan rencana strategis, hingga penetapan rancangan rencana strategis, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan rancangan awal RPJMD. rancangan rencana strategis ini memperhatikan rancangan rencana strategis BKKBN Pusat dan Perwakilan BKKBN Jawa Barat.

Memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan meningkatkan kinerja lembaga, Rancangan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi 2024-2026 disusun sebagai kelanjutan dari Rancangan Rencana Strategis periode 2019-2023. Pencapaian produk-produk perencanaan dan hasil-hasil kajian strategik pembangunan, restrukturisasi organisasi, pembinaan Sumber Daya Aparatur, penyempurnaan manajemen

selama periode 2019-2023 merupakan modal bagi perencanaan program pembangunan daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rancangan Rencana Strategis DPPKB Kota Bekasi Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Kedudukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;

- 14. Peraturan wali kota Bekasi no 09, tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.
- 15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi;

**1.3. Maksud dan Tujuan**

**1. Maksud**

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi disusun sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi serta sebagai pedoman dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.

**2. Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Rancangan Rencana Strategis DPPKB Kota Bekasi yaitu sebagai berikut:

- A. Memberikan arah tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah.
- B. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan DPPKB Kota Bekasi untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

**1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rancangan Rencana Strategis DPPKB Kota Bekasi Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis DPPKB Kota Bekasi.

**Bab II Gambaran Pelayanan DPPKB Kota Bekasi**

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur DPPKB Kota Bekasi, sumber daya DPPKB Kota Bekasi, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DPPKB Kota Bekasi.

**Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DPPKB Kota Bekasi, Telaahan Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan

Wakil Wali Kota Terpilih ,telaahan Rancangan Rencana Strategis BKKBN, telaahan Rancangan Rencana Strategis Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

#### **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah DPPKB Kota Bekasi.

#### **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini membahas rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang. Pada bab ini juga membahas relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

#### **BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan DPPKB Kota Bekasi.

#### **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini berisi tentang indikator kinerja DPPKB Kota Bekasi mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

#### **Bab VIII Penutup**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Rancangan Rencana Strategis DPPKB Kota Bekasi

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DPPKB KOTA BEKASI**

#### **2.1 Struktur Organisasi dan Tugas Pokok, Fungsi DPPKB Kota Bekasi**

##### **1. Struktur Organisasi**

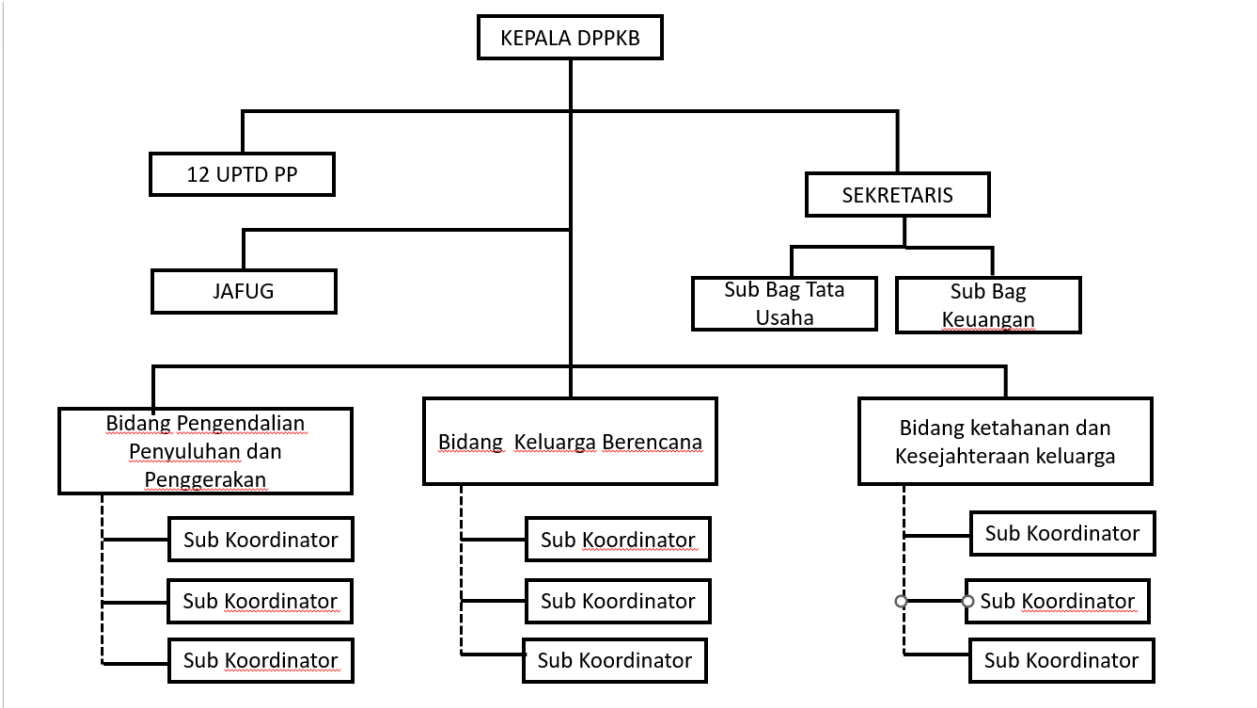
Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, 11 (sebelas) Kepala Seksi dan 2 (dua) Kasubag dan 12 (dua belas) Unit Pelaksana Teknis Dinas PP (UPTD) serta adanya kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

- A. Kepala Dinas
- B. Sekretariat, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
- C. Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan , membawahkan ;
- D. Bidang Keluarga Berencana membawahkan ;
- E. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga membawahkan ;
- F. Sub Koordinator;
- G. Unit Pelaksana Teknis Dinas PP (UPTD); dan
- H. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lengkap Struktur Organisasi DPPKB Kota Bekasi , disajikan dalam Gambar.2.1.

Gambar.2.1.  
Struktur Organisasi  
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bekasi



2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran RPD Kota Bekasi tahun 2023-2024.

- Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai fungsi :
- A. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
  - B. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - C. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - D. Pembinaan administrasi perkantoran;
  - E. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan

Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;

- F. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
- G. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- H. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- I. Pemberian laporan pertanggung jawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

### **3. Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPPKB**

- A. Konseling PUS yang belum ber KB.
- B. Pembinaan Akseptor KB Aktif.
- C. Pembinaan Akseptor KB Melalui Tim KB Keliling (TKBK).
- D. Penyusunan Dokumen dan Evaluasi Program (KKBPK).
- E. Konseling Keluarga Berencana.
- F. Study Ketahanan Keluarga Kota Bekasi, Masyarakat Kota Bekasi Multi Perspektif.
- G. Pengembangan Media Belajar tentang Kesehatan Reproduksi Remaja yang Online (E-learning) dan Sosial Media.
- H. Penulisan dan Pencetakan Buku Bacaan tentang Keluarga Sejahtera.
- I. Program Rintisan Remaja Relawan Kesehatan Reproduksi Untuk Teman Sebaya Berbasis Sekolah, Komunitas dan Lembaga Keagamaan, Rekrutmen, Training, Kegiatan di Lapangan dan Workshop.
- J. Pelaksanaan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.
- K. Pembinaan Tri Bina Keluarga (BKB, BKR, dan BKL).
- L. Lomba Ketahanan Keluarga dan Penyelenggaraan Hari Keluarga .
- M. Pelaksanaan Pembinaan dan Pendampingan Kelompok UPPKS.
- N. Pelaksanaan Pembinaan Generasi Berencana.
- O. Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Ketahanan Keluarga.
- P. Pembimbingan Terhadap PKB/PLKB Dalam Memberikan Advokasi dan Penggerakkan Kepada Pimpinan Wilayah, Toga, Kader KB/IMP.
- Q. Penyusunan Bahan Perencanaan Dalam Pelaksanaan Advokasi dan Penggerakkan Program KB.
- R. Pengumpulan Bahan dan Konsep Advokasi dan Penggerakkan.
- S. Pelaksanaan Entry Data dan Pelaporan Klinik KB.
- T. Pelaksanaan Pendataan Keluarga.

- U. Penyusunan Laporan Umpan Balik Pencapaian KB Aktif dan Akseptor Baru Serta Evaluasi Program KB dan Ketahanan Keluarga.
- V. Pelaksanaan Pembinaan Teknis PLKB dan PKB.
- W. Pelaksanaan Bimbingan Teknis PLKB dan PKB.
- X. Pembinaan dan Sosialisasi terhadap PLKB/PKB, Kader dan Kader IMP.
- Y. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS Gaji dan Tunjangan.
- Z. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Ganti Uang (GU).
- AA. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambahan Uang (TU).
- BB. Verifikasi Keuangan.
- CC. Surat Masuk.
- DD. Surat Keluar.
- EE. Penyusunan Renja.
- FF. Penyusunan Rancangan Rencana Strategis.
- GG. Penyusunan Lakip.
- HH. Pelayanan Informasi PPID Pembantu.
- II. Usulan Kenaikan Gaji Berkala.
- JJ. Usulan Kenaikan Pangkat.
- KK. Usulan Pensiun.
- LL. Usulan Kartu Pegawai.
- MM. Usulan Kartu Istri / Suami.
- NN. Pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) PNS.
- OO. Surat Permohonan Cuti.
- PP. Penyusunan Daftar Urut Kepangakatan (DUK).
- QQ. Penyusunan Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Ruang (KIR).

## **2.2 Sumber Daya DPPKB Kota Bekasi**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menjalankan program dan kegiatan didukung oleh 47 orang Pegawai Negeri Sipil, 29 orang Tenaga Kontrak Kerja (TKK), 15 Orang Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan 19 Orang Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan (TPD/K) jumlah keseluruhannya 103 orang.

47 Orang Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :

- A. 1 orang Kepala Dinas
- B. 1 orang Sekretaris
- C. 3 orang Kepala Bidang

- D. 8 orang Sub koordinator
- E. 2 orang Kasubbag
- F. 12 orang Ka. UPTD PP
- G. 20 orang pelaksana

Saat ini jumlah tenaga penyuluh Keluarga Berencana sebanyak 60 orang yang terdiri dari :

- A. 19 orang Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) adalah tenaga fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang status kepegawaian sebagai pegawai pusat BKKBN yang ditempatkan di Kota Bekasi.
- B. 12 orang Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan (TPD/K) yang diangkat oleh Provinsi Jawa Barat yang ditempatkan di Kota Bekasi.
- C. 29 orang Tenaga Kontrak Kerja (TKK) dimana sebelum menjadi TKK dahulu status kepegawaian mereka sebagai TPD.

Petugas Lapangan merupakan kepanjangan tangan dinas dalam pencapaian program KKBPK, dengan demikian Kota Bekasi sebagai instansi pembina perlu melakukan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan motivasi dan kompetensi kerja para Petugas Lapangan Keluarga Berencana.

Jumlah Pegawai Perempuan di DPPKB sebanyak 103 Orang sedangkan Laki-laki 27 Orang hal ini menunjukkan adanya kesetaraan gender karena penempatan pegawai tidak hanya dilihat dari jenis kelamin akan tetapi pendidikan serta keterampilan yang dimiliki karena DPPKB merupakan salah satu Dinas yang melakukan pelayanan kepada Masyarakat.

Table 2.1  
 Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Jenis Kelamin :

| Jenis Kelamin | Jumlah |
|---------------|--------|
| Laki-Laki     | 27     |
| Permpuan      | 76     |
| Jumlah Total  | 103    |

Untuk Sumber Daya Manusia yang menduduki Eselon II dan III sudah sesuai dengan formasi yang tersedia, sedangkan untuk Sub koordinator masih terdapat kekosongan jabatan disebabkan karena ada Sub koordinator yang pensiun belum ada pengangkatan pengisian

jabatan tersebut. Sedangkan tenaga Pelaksana di lingkup DPPKB sudah sesuai dengan analisa jabatan yang dibutuhkan. Untuk Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan PLKB yang merupakan tenaga fungsional Penyuluh Keluarga Berencana masih membutuhkan tenaga tambahan SDM sesuai dengan Indikator Cakupan PKB dan PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk adalah 1:2, Kota Bekasi mempunyai 56 Kelurahan maka diperlukan tenaga sebanyak 112 Orang untuk memenuhi Indikator capaian di tahun ke-3 pada tahun 2026, digambarkan pada tabel 2.2.

Table 2.2

Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Golongan dan Jabatan

| Golongan/<br>Jabatan | Eselon |       |       |      |      | PKB | Pelaksana | TKK | TKK<br>PLKB | TPD |
|----------------------|--------|-------|-------|------|------|-----|-----------|-----|-------------|-----|
|                      | II     | III.a | III.B | IV.a | IV.B |     |           |     |             |     |
| IV.d                 |        |       |       |      |      |     |           |     |             |     |
| IV.c                 |        |       |       |      |      |     |           |     |             |     |
| IV.b                 | 1      |       | 1     |      |      |     |           |     |             |     |
| IV.a                 |        | 1     | 2     | 6    |      |     | 4         |     |             |     |
| III.d                |        |       |       | 5    |      |     | 7         |     |             |     |
| III.c                |        |       |       | 1    |      |     | 4         |     |             |     |
| III.b                |        |       |       | 1    |      |     | 5         |     |             |     |
| III.a                |        |       |       |      |      |     | 5         |     |             |     |
| II.d                 |        |       |       |      |      |     | 1         |     |             |     |
| II.c                 |        |       |       |      |      |     | 1         |     |             |     |
| II.b                 |        |       |       |      |      |     | 2         |     |             |     |
| II.a                 |        |       |       |      |      |     |           |     |             |     |
| Non-Golongan         |        |       |       |      |      |     |           | 11  | 18          | 12  |
| Jumlah               | 1      | 1     | 3     | 13   |      | 14  | 31        | 11  | 18          | 12  |

Pada tabel 2.3 Pejabat Struktural 74% sudah menyelesaikan pendidikan S2 sedangkan 26% masih berpendidikan S1 hal ini perlu dukungan untuk meningkatkan strata pendidikan agar pejabat struktural memiliki pendidikan minimal S2 dan untuk meningkatkan kinerja para Pejabat Struktural, untuk PKB, Pelaksana TKK/TPD masih ada 53 orang yang

berpendidikan Sekolah Menengah Atas sangat diperlukan peningkatan pendidikan untuk menunjang profesionalisme dalam bekerja.

Tabel 2.3  
Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Pendidikan

| Jabatan/Pendidikan | S3 | S2 | S1 | D III | SMA | SMP |
|--------------------|----|----|----|-------|-----|-----|
| Eslon II           | 1  |    |    |       |     |     |
| Eslon III.a        |    | 1  |    |       |     |     |
| Eslon III.B        |    | 3  |    |       |     |     |
| Eslon IV.a         |    | 12 | 7  |       |     |     |
| Eslon IV.B         |    |    |    |       |     |     |
| PKB                |    |    | 7  | 7     | 5   |     |
| Pelaksana          |    | 2  | 12 | 3     | 6   |     |
| TKK/PLKB           |    |    | 12 | 3     | 14  |     |
| TPD                |    |    | 2  | 2     | 8   |     |
| Jumlah             | 1  | 18 | 40 | 15    | 33  |     |

Tabel 2.4  
Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Umur

| Jabatan/Pendidikan | 20-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Eslon II           |       |       |       |       |       |       |       | 1     |
| Eslon III.a        |       |       |       |       |       |       | 1     |       |
| Eslon III.B        |       |       |       |       |       | 1     | 2     |       |
| Eslon IV.a         |       |       |       | 1     | 1     | 1     | 5     | 5     |
| Eslon IV.B         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| PKB                |       |       | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 3     |
| Pelaksana          |       |       | 1     | 7     | 5     | 6     | 5     | 5     |
| TKK                | 3     | 4     | 5     | 8     | 5     | 3     | 1     |       |
| TPD                | 5     | 1     |       | 4     | 2     |       |       |       |

Dilihat dari umur rata-rata usai produktif dalam bekerja diusia 51-55 tahun sebesar 32% dan umur 20-25 tahun sebesar 68%.

Pada Tabel 2.5 Kesiadaan sarana dan prasarana di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Kantor Balai Penyuluh Keluarga Berencana untuk kendaraan roda 4 (empat) sebagai operasional pejabat struktural mobilisasi dalam pelaksanaan pelayanan KB sudah mencukupi. Akan tetapi untuk kendaraan pelayanan KB DPPKB belum memiliki sarana sebagaimana mestinya dilapangan baik kendaraan roda empat dan roda dua. Demikian juga dengan perangkat Komputer belum mencukupi dalam rangka untuk meningkatkan kinerja Pegawai DPPKB Kota Bekasi.

Table 2.5  
Aset Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

| NO | JENIS BARANG                     | JUMLAH | KETERANGAN                      |
|----|----------------------------------|--------|---------------------------------|
| 1  | Kendaraan Roda 4 Mobil           | 8      | 8 Kondisi Baik                  |
| 2  | Kendaraan Roda 2 Motor           | 59     | 54 Kondisi Baik, 5 rusak sedang |
| 3  | PC Unit Komputer                 | 46     | Kondisi Baik                    |
| 4  | Laptop Note Book                 | 40     | Kondisi Baik                    |
| 5  | Personal Komputer                | 9      | Kondisi Baik                    |
| 6  | Proyektor Infokus                | 10     | Kondisi Baik                    |
| 7  | AC Unit                          | 3      | Kondisi Baik                    |
| 8  | Alat Kantor                      | 224    | Kondisi Baik                    |
| 9  | Meubel                           | 1      | Kondisi Baik                    |
| 10 | Alat Kedokteran KB / Alat Peraga | 39     | Kondisi Baik                    |

2.3 Kinerja Pelayanan DPPKB Kota Bekasi

1. Pencapaian Indikator Kinerja

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan atau indikator lainnya yang telah diratifikasi oleh pemerintah daerah, pada tahun 2017 sudah mencapai target yang direncanakan sedangkan untuk tahun 2024 sebagian target belum tercapai. Adapun tabel yang perlu disajikan adalah sebagai berikut:

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah

### 1. Tantangan

- a. Belum tercapainya target Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR);
- b. Belum Tercapainya Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi (Unmet Need); karena masih tingginya tingkat putus pakai kontrasepsi (DO) dan kehamilan yang tidak diinginkan;
- c. Belum Tercapainya Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
- d. Masih Tingginya Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19 tahun).
- e. Masih rendahnya kesertaan KB pada sasaran khusus seperti Kesertaan KB Pria, PUS dengan anak stunting, PUS miskin, dan PUS Risiko Tinggi 4 (empat) terlalu.
- f. PUS yang dengan anak stunting dapat disebabkan karena risiko 4 (empat) terlalu, dan PUS miskin juga 9 berisiko melahirkan anak stunting karena keterbatasan asupan gizi pada ibu.
- g. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan reproduksi, perilaku berisiko, dan pendidikan seksual pada remaja dan PUS;
- h. Program KBKR belum menjadi program prioritas daerah
- i. Pengelolaan program KBKR di lini lapangan belum memadai karena jumlah PKB/PLKB yang relatif sedikit dan belum merata;
- j. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
- k. Belum optimalnya kualitas pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang meliputi: pemberian informasi pilihan metode kontrasepsi; hubungan provider dengan klien; informasi efek samping; kompetensi provider; mekanisme agar klien selalu menggunakan kontrasepsi; dan pelayanan ekstra pada klien;
- l. Belum optimalnya sertifikasi kompetensi tenaga kesehatan pelayanan KB (bidan, dokter, dan dokter obsgyn);
- m. Masih rendahnya cakupan KB Pascapersalinan karena kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dan petugas; belum optimalnya konseling KB Pascapersalinan sebelum maupun sesudah persalinan dan kurangnya tenaga terlatih KB Pascapersalinan;

- n. Belum optimalnya mekanisme rantai pasok alokon yang meliputi seleksi produk, penajaman perencanaan kebutuhan, mekanisme pengadaan, perluasan cakupan distribusi, peran swasta, dan digitalisasi rantai pasok;
- o. Pengelolaan dan penyediaan alokon dan prasarana, serta sarana pelayanan KB belum efektif karena belum optimalnya pemantauan ketersediaan alokon dan sarana penunjang pelayanan KB di fasilitas kesehatan, jaringan serta jejaringnya;
- p. Belum optimalnya pemanfaatan DAK Fisik dan Non-Fisik (BOKB) yang berkaitan dengan penyelenggaraan program KB dan Kesehatan Reproduksi;
- q. Masih rendahnya cakupan Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pratama (FKTP) swasta, serta jejaring Praktik Mandiri Bidan yang melayani KB yang teregistrasi di BKKBN (K/0/KB);
- r. Kurang optimalnya pelayanan KB di Rumah Sakit terutama sejak diberlakukannya program jaminan kesehatan karena adanya mekanisme rujukan berjenjang sehingga Rumah Sakit tidak dapat langsung melayani KB tanpa ada rujukan dari faskes dibawahnya, serta masih adanya hambatan terkait pembiayaan pelayanan KB pada pascapersalinan di Rumah Sakit;
- s. Belum optimalnya pemanfaatan pembiayaan pelayanan KB melalui mekanisme jaminan kesehatan;
- t. Peningkatan kerjasama dengan stakeholders terkait;
- u. Belum optimalnya sosialisasi terhadap remaja, khususnya calon pengantin;
- v. Belum optimalnya UPPKA yang mempunyai sertifikasi;
- w. Belum optimalnya sarana dan prasaran untuk memasarkan produk UPPKA;
- x. Belum terlaksananya CSR untuk program UPPKA;
- y. Masih rendahnya pengetahuan tentang 1000HPK di Masyarakat;
- z. Perubahan struktur keluarga dan mobilitas anggota keluarga yang menyebabkan berkurangnya kualitas hubungan antar anggota keluarga.

## **2. Peluang**

- a. Tersedianya regulasi yang memberikan mandat kepada BKKBN untuk menyelenggarakan program keluarga berencana untuk mewujudkan hak-hak reproduksi bagi calon atau pasangan suami istri;
- b. Tersedianya peraturan, kebijakan, pedoman dan panduan penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- c. Adanya kewenangan BKKBN dalam pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan KB untuk kebutuhan Pasangan Usia Subur

(PUS) nasional serta menetapkan standarisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);

- d. Tersedianya variasi alat dan obat kontrasepsi yang disediakan pemerintah;
- e. Tersedianya SDM yang mampu mengelola program keluarga berencana termasuk pemberian penyuluhan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi oleh tenaga penyuluh KB;
- f. Tersedianya jaringan institusi masyarakat (PPKBD/Sub PPKBD, Kelompok kegiatan (Poktan) serta motivator dan kelompok KB Pria) untuk meningkatkan KIE, promosi dan konseling pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi;
- g. Adanya peran sektor swasta dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi (alokan swasta, Praktik Mandiri Bidan, Dokter Praktek Swasta);
- h. Adanya kerjasama dalam peningkatan kompetensi tenaga pelayanan dan pengelola program dalam penyelenggaraan pelayanan KB dan KR;
- i. Adanya sistem pembiayaan pelayanan KB melalui Program Jaminan Kesehatan ataupun melalui skema pembiayaan pelayanan bakti sosial KB oleh BKKBN;
- j. Ketersediaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Bantuan Operasional KB (BOKB) untuk mendukung program KB dan Kesehatan Reproduksi;
- k. Adanya sistem pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program KB dan Kesehatan Reproduksi;
- l. Menjalin kerjasama dengan stakeholder dalam perencanaan maupun pelaksanaan dalam membangun kependudukan, keluarga Berencana dan pembangunan keluarga di Kota Bekasi;
- m. Adanya peran sector lain untuk mendukung kegiatan UPPKA;
- n. Tersedianya sarana dan prasaran untuk konseling ketahanan keluarga;
- o. Adanya peran sector lain yang bekerjasama untuk PIK-R,BKB dan BKL;
- p. Peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga khususnya pengasuhan, tumbuh kembang anak dan gizi;
- q. Peningkatan pemahaman peran keluarga yang memiliki anak remaja dalam pengasuhan dan pembentukan karakter remaja;
- r. Peningkatan penyampaian informasi dan edukasi pada remaja dalam pembentukan karakter;
- s. Peningkatan pemahaman keluarga dalam pola pengasuhan dan pendampingan anak sejak usia dini;
- t. Penguatan pemberdayaan ekonomi keluarga guna meningkatkan kualitas keluarga.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPPKB Kota Bekasi.**

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi saat perencanaan dibuat.

Permasalahan terkait tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah adalah:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; dan
- e. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

### **3.2. Telaahan Prioritas Pembangunan Daerah**

Dalam rangka menghadapi permasalahan dan isu-isu strategis serta tantangan dan perkembangan perubahan yang akan terjadi sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Kota Bekasi, dalam menyelenggarakan pemerintahan yang mengacu dalam peyeleggaraan urusan pemritahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam mendukung RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang mempunyai daya ungkit dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Bekasi 2024-2026 yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, dinamis dan akutabel dan terwujudnya pembagunan manusia dan masyarakat yang berkualitas secara berkeadilan.

Berdasarkan tugas dan fungsi DPPKB yang terkait dengan RPD Kota Bekasi 2024-

2026 maka Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Penduduk Tanpa Pertumbuhan (PTP). Meskipun pembangunan di bidang kependudukan di Kota Bekasi telah menunjukkan hasil-hasil yang menggembirakan, namun secara umum situasi dan kondisi kependudukan masih perlu ditingkatkan kualitasnya dimana wilayah Kota Bekasi tiap tahun menjadi tujuan bagi para pendatang baru usai lebaran sehingga rata-rata kenaikan jumlah penduduk di Kota Bekasi mencapai 3 persen dari total jumlah penduduk 2.592.819 jiwa atau sekitar 77.785 orang pertahun. (Sumber data : <http://www.beritasatu.com>)

Apabila tidak diimbangi dengan upaya pengendalian kuantitasnya, maka akan semakin sulit bagi pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan kualitas penduduknya. Pada akhirnya upaya-upaya untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam *Sustainable Development Goal's* (SDG's) akan semakin sulit dipenuhi.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menangani masalah kependudukan ini adalah dengan mengendalikan jumlah penduduk dan meningkatkan kualitasnya. Hal ini antara lain dilakukan dengan menggalakkan dan meneguhkan kembali Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di semua tingkatan Kota Bekasi.

Dalam rangka mendukung pencapaian IPM Kota Bekasi tahun 2024 yang pelaksanaannya mengacu pada 17 tujuan pokok SDG's, khususnya yang terkait dengan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , yakni:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun (*Tanpa Kemiskinan*);
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi dan mendorong pertanian yang berkelanjutan ( *Tanpa Kelaparan* );
3. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia ( *Kesehatan yang baik dan kesejahteraan* );
4. Menjamin Pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang ( *Pendidikan Berkualitas*);
5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan (*Kesetaraan Gender*);
6. Menjamin kesediaan dan Pengelolaan air serta Sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang ( *Air Bersih dan Sanitasi* ) ;
7. Menjamin akses energy yang terjangkau,terjamin,berkelanjutan serta modern bagi semua orang ( *Energi Bersih dan Terjangkau* );
8. Mendorong Pertumbuhan ekonomi dan Pekerjaan yang layak ( *Pertumbuhan ekonomi dan Pekerjaan yang layak* );
9. Membangun infrastruktur yang berketahanan,mendorong industrialisasi yang inklusif

- dan berkelanjutan serta membina inovasi ( *Industri, Inovasi dan Infrastruktur* );
10. Menjadikan Kota dan pemukiman manusia inklusif aman,berketahan dan berkelanjutan ( *Keberlanjutan Kota dan Komunitas* );
  11. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antra Negara ( *Mengurangi Kesenjangan* );
  12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang berkelanjutan ( *Konsumsi dan Produksi Bertanggung jawab* );
  13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya ( *Aksi Terhadap Iklim*);
  14. Melestarikan dan menggunakan samudra,lautan dan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan ( *Kehidupan Bawah Laut*);
  15. Melindungi,memperbaharui serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan,mengelola hitan secara berkelanjutan,mengurangi penggurunan,menghentikan dan memulihkan degradasi tanah,serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati ( *Kehidupan di darat* );
  16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan,menyediakan akses keadilan bagi semua orang,serta membangun institusi yang efektif,akuntabel dan inklusif di seluruh tingkatan ( *Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian* );
  17. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (Mean of implementation) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan ( *Kemitraan untuk mencapai Tujuan* ).

Sejalan dengan arah pembangunan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, ke depan Kota Bekasi berupaya melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui upaya peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan
2. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam tumbuh kembang balita, pembinaan remaja, pembinaan lansia dan pembinaan lingkungan keluarga melalui BKB, BKR, BKL
3. Peningkatan pendapatan keluarga khususnya keluarga Pra sejahtera dan KS melalui UPPKS
4. Meningkatkan kualitas reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan generasi yang lebih baik, melalui Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).
5. Memperkuat kelembagaan dan jaringan KB dalam meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat.

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di lapangan akan sangat memperhatikan kondisi daerah, diantaranya meliputi :

1. Memberikan peluang pengembangan keragaman pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai kondisi dan aspirasi masyarakat dengan tetap mengacu pada tujuan program.
2. Memadukan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan berbagai program pembangunan lainnya untuk mencapai hasil optimal bagi masyarakat luas.
3. Mengembangkan kemitraan dan kerjasama sinergis dengan semua pihak dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.
4. Mengoptimalkan kepedulian dan peranserta masyarakat melalui pengembangan potensi yang tersedia.
5. Memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan untuk memberikan kepuasan maksimal kepada masyarakat.
6. Memperhatikan pelayanan untuk keluarga melalui penggarapan kampung KB.

Sesuai dengan Program tersebut di atas, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi dengan tugas pokok dan fungsinya, yaitu :

1. Mengatur, mengendalikan Pertumbuhan Penduduk Seimbang;
2. Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
3. Meningkatkan Pengelolaan Potensi Keluarga;
4. Meningkatkan dukungan manajemen yang handal dalam Pengendalian.

### **3.3. Telaahan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Strategis BKKBN.**

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Rancangan Rencana Strategis K/L ataupun Rancangan Rencana Strategis PD provinsi.

Rancangan Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN 2020-2024 telah ditetapkan dengan Peraturan BKKBN Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rancangan Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024.

Adapun garis besar Rancangan Rencana Strategis tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Tujuan BKKBN

Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, BKKBN memiliki tujuan untuk:

- a. Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia.
- b. Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

## 2. Sasaran Strategis BKKBN

Untuk menjamin dukungan BKKBN terhadap upaya pencapaian Visi, Misi dan Janji Presiden 2020-2024 dan Prioritas Pembangunan Nasional yang tertera dalam RPJMN 2020-2024, serta untuk memastikan Visi, Misi dan Tujuan BKKBN yang telah ditetapkan dapat tercapai, diperlukan suatu ukuran keberhasilan atas seluruh Program dan Kegiatan Prioritas yang dilakukan dalam bentuk Sasaran Strategis. Dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

- a. Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024.
- b. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024.
- c. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/UnmetNeed 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024.
- d. Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age SpecificFertilityRatio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18 per1.000 kelahiran pada 2024.
- e. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024.
- f. Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024.

### 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

atau hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD dan Rancangan Rencana Strategis periode tahun sebelumnya. Berikut adalah isu strategis terkait perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi adalah Indeks pembangunan keluarga.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Terkait dengan penjabaran tujuan dan sasaran Kota Bekasi maka rumusan tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi sebagai berikut :

#### **4.1 Tujuan**

Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis tahun 2024 - 2026 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi dan mengacu pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, maka dirumuskan tujuan yaitu sesuai dengan Rencana Strategis Perubahan 2024-2026 sebagai berikut :

1. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
  - a. Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
  - b. Meningkatkan Kesertaan ber KB;
  - c. Penurunan angka kelahiran di usia 15-19 tahun ;
  - d. Penurunan Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi (Unmet Need);
  - e. Pentingnya data pengendalian penduduk sebagai dasar pengambilan keputusan.
2. Mewujudkan akuntabilitas

#### **4.2 Sasaran**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kota Bekasi maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2024–2026 mempunyai indikator sasaran :

1. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan sasaran mempertahankan kesertaan ber -Kb
  - A. Presentasi balita stanting;
  - B. Media usia kawin pertama (MUKP) usia 25-49 Tahun;
  - C. Presentasi peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka (MKJP);
  - D. PanjangAngka kelahiran remaja umur 15-19 Tahun (ASFR);

- E. Angka prevalensi kontrasepsi moderen (mCPR);
  - F. Presentasi tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi;
  - G. Unmet Need (wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan tetapi tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi);
  - H. Indek pembangunan wawasan berkependudukan;
  - I. Presentasi kampung KB Mandiri;
  - J. Pesentasi masyarakat yang terjangkau program bangga kencana.
2. Mewujudkan Akutabilitas dengan sasaran Meningkatnya Akutabilitas Kinerja dan Profesionalisme Pengelolaan dan Pelayanan

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2024-2026**

| No | Tujuan                                  | Indikator Tujuan          | Sasaran                                                                         | Indikator Sasaran                             | Satuan | Kondisi Awal<br>(2024) | Target Kinerja Sasaran |      |      | Target Akhir Rencana<br>Strategis Perubahan |
|----|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|------------------------|------------------------|------|------|---------------------------------------------|
|    |                                         |                           |                                                                                 |                                               |        |                        | 2024                   | 2025 | 2026 |                                             |
| 1. | Mewujudkan akutabilitas                 | Akutabilitas Kinerja      | Meningkatnya Akutabilitas Kinerja dan Profesionalisme Pengelolaan dan Pelayanan | Nilai AKIP                                    | Persen | 75.05                  | 75.05                  | 76   | 77   | 77                                          |
| 2. | Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk | Laju Pertumbuhan Penduduk | Mempertahankan kesertaan ber-KB                                                 | Pjumlah PPKS Aktif di Kecamatan               | unit   | 6                      | 8                      | 10   | 12   | 12                                          |
|    |                                         |                           |                                                                                 | Presentase Cakupan anggota poktan yang ber KB | Persen | 55                     | 60                     | 65   | 70   | 70                                          |

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 4.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berecana Kota Bekasi

Strategi merupakan suatu langkah dalam rangka memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun serta berpengaruh besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Kebijakan adalah pedoman pilihan yang dijadikan rumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 3 (tiga) tahun selama periode Rencana Strategis Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berecana Kota Bekasi Tahun 2024-2026 serta kebijakan ini diarahkan kepada pilihan strategis agar selaras dengan RPD Kota Bekasi serta peraturan perundang undangan yang berlaku.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berecana Kota Bekasi mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis dengan efektif dan efisien. Selain melakukan perencanaan komprehensif, perencanaan strategis juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rencana Strategis Badan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berecana Kota Bekasi pada tahun 2024-2026 penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai peranan penting dalam mendorong tujuan dan sasaran RPD Kota Bekasi 2023-2026, sebagaimana tertuang dalam Tupoksi Perangkat Daerah yang berdasarkan uraian mengenai kondisi umum masa kini dan kondisi lima tahun ke depan yang diinginkan yang dijadikan dasar dalam menentukan keberlanjutan pembangunan bidang aparatur.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berecana Kota Bekasi Kota Bekasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mengacu pada tujuan dan saaran RPD Kota Bekasi 2024-2026 pembangunan Kota Bekasi pada Misi Ke -1 (satu) **terwujudnya tata kelola pemerintahan yang**

**profesional, dinamis dan akuntabel**, sasaran meningkatnya akutabilitas dan profesinalisme pengelolaan dan layanan pemerintahan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel serta ke-2 (dua) yaitu **terwujudnya pembangunan manusia dan masyarakat yang berkualitas secara berkeadilan**, sasaran meningkatkan kesejahteraan keluarga dan pembangunan responsif gender

Strategi dan strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam RPD Kota Bekasi tahun 2024-2026 yang berhubungan dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Lkeluarga Berencana Kota Bekasi adalah Gini Ratio, mempunyai tujuan meningkatkan keajahteraan keluarga dan pembagunan responsif gender, indikator kinerja indek pembangunan keluarga, strategi yang digunakan adalah memfasilitasi pembangunan keluarga ber-wirausaha dengan kerjasama antar pihak, arah kebijakan penguatan ketahanan keluarga dan mendorong kewirausahaan secara inklusif

Terkait dengan misi tersebut maka tujuan yang ditetapkan adalah **Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk** dengan cara:

A. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (KS).

Dengan Indikator yaitu:

- Presentasi balita stanting;
- Media usia kawin pertama (MUKP) usia 25-49 Tahun.

B. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Dengan Indikator yaitu:

- Presentasi peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka (MKJP);
- PanjangAngka kelahiran remaja umur 15-19 Tahun (ASFR);
- Angka prevalensi kontrasepsi moderen (mCPR);
- Presentasi tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi;
- Unmet Need (wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan tetapi tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi).

C. Program Pengendalian Penduduk,

Dengan Indikator yaitu:

- Indek pembangunan wawasan berkependudukan;
- Presentasi kampung KB Mandiri;
- Pesentasi masyarakat yang terjangkau program bangga kencana.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel serta dengan cara :

A. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan.

Adapun sasaran yang ditetapkan adalah **Mempertahankan kesertaan ber-KB** untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kota Bekasi maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2024–2026 menyusun strategi sebagai berikut:

- A. Revitalisasi Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- B. Penyerasian kebijakan Pengendalian Penduduk
- C. Peningkatan ketersediaan dan kualitas Data dan Informasi Kependudukan yang memadai akurat dan tepat waktu

Arah Kebijakan operasional yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Bekasi adalah :

- 1. Pemenuhan PLB dan PLKB serta PPKBD
- 2. Pendataan informasi data mikro keluarga setiap kelurahan ;
- 3. Kelompok kegiatan yang melakukan 8 fungsi keluarga;
- 4. Pembinaan dan Komunikasi Informasi dan Edukasitentang KB dan 8 fungsi keluarga;
- 5. Melakukan pelayanan KB dengan bekerja dengan sektor terkait;
- 6. Melaksanakan pembentukan dan pembinaan UPPKA;
- 7. Penambahan PPKS Aktif di Kecamatan.

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan**

| Tujuan                                  | Sasaran                         | Strategi                                                                                                                                             | Arah Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk | Mempertahankan kesertaan ber-KB | 1. Program Pengendalian Penduduk.<br>2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)<br>3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | 1. Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah<br>2. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Derah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan kesertaan Ber-KB<br>3. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk<br>4. Pendayagunaan Tenaga penyuluha KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PKLB)<br>5. Pemberdayaan dan peningkatan Peran serta Organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |         |          | Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB<br>6. Pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan lokal<br>7. Pelaksanaan Pembangaunan keluarga Melalui Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga.<br>8. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. |

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN DINAS**  
**PENGNDALIA PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BEKASI**

Setelah dilakukan persamaan pemahaman dan penyamaan persepsi tentang pekerjaan yang akan dilakukan, penajaman terhadap maksud dan tujuan, penyamaan persepsi tentang beberapa konsep pokok, dan pembatasan ruang lingkup kerja dan penjadwalan pelaksanaan pokok yang disesuaikan dengan tuntutan arah dan perkembangan organisasi, Dinas Pngendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi menyusun program dan kegiatan untuk jangka waktu lima tahun ke depan dengan uraian yang dijabarkan dalam matriks berikut :

**TABLE 6.1**  
**RENCANA PROGRAM,KEGIATAN, INDIKATOR PROGRAM, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BEKASI**

[illegible]







| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM DAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                                                    | INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN PROGRAM (OUTCAME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)          | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN |                   |              |                   |              |                   | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | LOKASI |
|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------|--------|
|        |         |                                                                                                       |                                                                                   |                                          | TAHUN 1 2024                          |                   | TAHUN 2 2025 |                   | TAHUN 3 2026 |                   |                                        |        |
|        |         |                                                                                                       |                                                                                   |                                          | TARGET %                              | TARGET Rp. (Juta) | TARGET %     | TARGET Rp. (Juta) | TARGET %     | TARGET Rp. (Juta) |                                        |        |
|        |         | Pelaksanaan Pembangunan keluarga melalui pembinaan dan kesejahteraan keluarga                         |                                                                                   |                                          |                                       |                   |              |                   |              |                   |                                        |        |
|        |         | Sub Kegiatan:                                                                                         |                                                                                   |                                          |                                       |                   |              |                   |              |                   |                                        |        |
|        |         | Pelaksanaan rembuk stunting                                                                           | pelaksanaan kegiatan penurunan stunting                                           |                                          | 60%                                   | 400               | 60%          | 400               | 70%          | 300               |                                        |        |
|        |         |                                                                                                       |                                                                                   |                                          |                                       |                   |              |                   |              |                   |                                        |        |
|        |         | Kegiatan:                                                                                             |                                                                                   |                                          |                                       |                   |              |                   |              |                   |                                        |        |
|        |         | Pelaksanaan Pembangunan keluarga melalui pembinaan dan kesejahteraan keluarga                         |                                                                                   |                                          |                                       |                   |              |                   |              |                   |                                        |        |
|        |         | Sub Kegiatan:                                                                                         |                                                                                   |                                          |                                       |                   |              |                   |              |                   |                                        |        |
|        |         | Pelaksanaan kegiatan diseminasi dan rakor Tk Kota, Kecamatan dan kelurahan                            | Jumlah Kecamatan dan Kelurahan                                                    |                                          | 60%                                   | 250               | 60%          | 250               | 75%          | 300               |                                        |        |
|        |         |                                                                                                       |                                                                                   |                                          |                                       |                   |              |                   |              |                   |                                        |        |
|        |         | Kegiatan:                                                                                             |                                                                                   |                                          |                                       |                   |              |                   |              |                   |                                        |        |
|        |         | Pelaksanaan Pembangunan keluarga melalui pembinaan dan kesejahteraan keluarga                         |                                                                                   |                                          |                                       |                   |              |                   |              |                   |                                        |        |
|        |         | Sub Kegiatan:                                                                                         |                                                                                   |                                          |                                       |                   |              |                   |              |                   |                                        |        |
|        |         | Sarana Prasarana Penunjang TPK                                                                        | Jumlah saran dan Prasarana                                                        |                                          | 60%                                   | 1,600             | 65%          | 1,000             | 75%          | 1,000             |                                        |        |
|        |         |                                                                                                       |                                                                                   |                                          |                                       |                   |              |                   |              |                   |                                        |        |
|        |         |                                                                                                       |                                                                                   |                                          |                                       |                   |              |                   |              |                   |                                        |        |
|        |         | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (KS).                                     | Median usia kawin pertama (MUKP) usia 25-49 Tahun                                 | 37.25                                    | 37.25                                 |                   | 37.2         |                   | 37.15        |                   |                                        |        |
|        |         | Kegiatan:                                                                                             |                                                                                   |                                          |                                       |                   |              |                   |              |                   |                                        |        |
|        |         | Pelaksanaan Pembangaunan keluarga Melalui Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga.                       | Terlaksananya Pembangaunan keluarga Melalui Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga. |                                          |                                       |                   |              |                   |              |                   |                                        |        |
|        |         | Sub Kegiatan:                                                                                         |                                                                                   |                                          |                                       |                   |              |                   |              |                   |                                        |        |
|        |         | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R | Jumlah Peserta Sosialisasi                                                        | 60%                                      | 60%                                   | 150               | 65           | 200               | 75           | 250               |                                        |        |



[illegible]

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM DAN KEGIATAN./ SUB KEGIATAN                                                                                                                                    | INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN PROGRAM (OUTCAME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)                  | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN |                   |              |                   |              |                   | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | LOKASI |
|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------|--------|
|        |         |                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                                          | TAHUN 1 2024                          |                   | TAHUN 2 2025 |                   | TAHUN 3 2026 |                   |                                        |        |
|        |         |                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                                          | TARGET %                              | TARGET Rp. (Juta) | TARGET %     | TARGET Rp. (Juta) | TARGET %     | TARGET Rp. (Juta) |                                        |        |
|        |         | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelolaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga {BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS}                 | Jumlah pengadaan pelatihan Teknis                                                         | 60                                       | 60                                    | 150               | 65           | 200               | 70           | 300               |                                        |        |
|        |         |                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                                          |                                       |                   |              |                   |              |                   |                                        |        |
|        |         | Kegiatan:                                                                                                                                                              |                                                                                           |                                          |                                       |                   |              |                   |              |                   |                                        |        |
|        |         | Pelaksanaan Pembangaunan keluarga Melalui Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga.                                                                                        |                                                                                           |                                          |                                       |                   |              |                   |              |                   |                                        |        |
|        |         | Sub Kegiatan:                                                                                                                                                          |                                                                                           |                                          |                                       |                   |              |                   |              |                   |                                        |        |
|        |         | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana {Kader}, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga { BKB, BKR, BKL, P3KS, PIK/R dan pemberdayaan Ekonoi Keluarga} | Jumlah biaya operasional kader Tri Bina                                                   | 65                                       | 65                                    | 200               | 70           | 250               | 70           | 250               |                                        |        |
|        |         |                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                                          |                                       |                   |              |                   |              |                   |                                        |        |
|        |         | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                                                                                                                              | Presentasi peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka (MKJP);                             | 27                                       | 27                                    |                   | 27.05        |                   | 27.15        |                   |                                        |        |
|        |         |                                                                                                                                                                        | Angka prevalensi kontrasepsi moderen (mCPR);                                              | 79.83                                    | 79.83                                 |                   | 80           |                   | 80.1         |                   |                                        |        |
|        |         | Kegiatan:                                                                                                                                                              |                                                                                           |                                          |                                       |                   |              |                   |              |                   |                                        |        |
|        |         | Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat kontrasepsi serta Pelayanan KB                                                                                          |                                                                                           |                                          |                                       |                   |              |                   |              |                   |                                        |        |
|        |         | Sub Kegiatan:                                                                                                                                                          |                                                                                           |                                          |                                       |                   |              |                   |              |                   |                                        |        |
|        |         | Distribusi alat dan Obat Kontrasepsi Ke faskes, Jaringan dan Jejaringnya 250 faskes                                                                                    | Terdistribusi alat dan Obat Kontrasepsi Ke faskes, Jaringan dan Jejaringnya               |                                          | 100.00                                | 180               | 100          | 180               | 100          | 180               |                                        |        |
|        |         | Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP 5 kasus                                                                                      | Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP                |                                          | 100.00                                | 75                | 100          | 75                | 100          | 75                |                                        |        |
|        |         | Pembinaan Pelayanan KBKR di Faskes termasuk Jaringan dan jejaringannya serta KB Pasca Salin                                                                            | Terbina Pelayanan KBKR di Faskes termasuk Jaringan dan jejaringannya serta KB Pasca Salin |                                          | 100.00                                |                   | 100          |                   | 100          |                   |                                        |        |
|        |         | Peningkatan Kesertaan KB Pria                                                                                                                                          | Meningkatnya peserta KB Pria                                                              |                                          | 100.00                                |                   | 100          |                   | 100          |                   |                                        |        |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM DAN KEGIATAN./ SUB KEGIATAN                                                                                                                                                    | INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN PROGRAM (OUTCAME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN |                   |              |                   |              |                   | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | LOKASI |
|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------|--------|
|        |         |                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                          | TAHUN 1 2024                          |                   | TAHUN 2 2025 |                   | TAHUN 3 2026 |                   |                                        |        |
|        |         |                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                          | TARGET %                              | TARGET Rp. (Juta) | TARGET %     | TARGET Rp. (Juta) | TARGET %     | TARGET Rp. (Juta) |                                        |        |
|        |         | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi                                                                                                    | Meningkatnya Kopetensi Tenaga Pelayanan KBKR                             |                                          | 100.00                                | 150               | 100          | 150               | 100          | 150               |                                        |        |
|        |         | Penyediaan alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana Penunjang Pelayanan KB Lainnya                                                                                                         | Tersedianya alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana Penunjang KB lainnya    |                                          | 100.00                                | 200               | 100          | 200               | 100          | 200               |                                        |        |
|        |         | Peningkatan Pelayanan KB Metoda Tubektomi dan Vasektomi (MOW dan MOP) 100 aks                                                                                                          | Meningkatnya Pelayanan KB Metoda Tubektomi dan Vasektomi (MOW dan MOP)   |                                          | 100.00                                | 500               | 100          | 500               | 100          | 500               |                                        |        |
|        |         | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                                                                                                                                              | PanjangAngka kelahiran remaja umur 15-19 Tahun (ASFR);                   | 11.00                                    | 11.00                                 |                   | 10.5         |                   | 10           |                   |                                        |        |
|        |         | Kegiatan:                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                          |                                       |                   |              |                   |              |                   |                                        |        |
|        |         | Advokasi Komunikasi , Informasi Edukasi (KIE)Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan lokal                                                                                        |                                                                          |                                          |                                       |                   |              |                   |              |                   |                                        |        |
|        |         | Sub Kegiatan:                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                          |                                       |                   |              |                   |              |                   |                                        |        |
|        |         | Kegiatan advokasi program KKBPK pada steak holder dan mitra kerja serta Koordinasi wilayah (Minilokakarya Kecamatan dan Lomba)                                                         |                                                                          |                                          | 100.00                                | 250               | 100          | 250               | 100          | 250               |                                        |        |
|        |         | Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK (Pembuatan Film, Poster, Spanduk, Talk Show, Radio, Video tron) |                                                                          |                                          | 100                                   | 1,000             | 100          | 1,000             | 100          | 1,000             |                                        |        |
|        |         | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                                                                                                                                              | Presentasi tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi;                | 27,5                                     | 27,5                                  |                   | 28           |                   | 28,5         |                   |                                        |        |
|        |         | Kegiatan:                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                          |                                       |                   |              |                   |              |                   |                                        |        |
|        |         | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                            |                                                                          |                                          |                                       |                   |              |                   |              |                   |                                        |        |
|        |         | Sub Kegiatan:                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                          |                                       |                   |              |                   |              |                   |                                        |        |
|        |         | Pelayanan KB terintegrasi di KP KB                                                                                                                                                     |                                                                          |                                          | 100                                   | 500               | 100          | 500               | 100          | 500               |                                        |        |
|        |         | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB                                                                                                                                |                                                                          | 25                                       | 100                                   | 300               | 37           | 300               | 56           | 300               |                                        |        |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM DAN KEGIATAN./ SUB KEGIATAN                                                                                                          | INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN PROGRAM (OUTCAME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)                                                                     | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN |                   |              |                   |              |                   | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | LOKASI |
|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------|--------|
|        |         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                          | TAHUN 1 2024                          |                   | TAHUN 2 2025 |                   | TAHUN 3 2026 |                   |                                        |        |
|        |         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                          | TARGET %                              | TARGET Rp. (Juta) | TARGET %     | TARGET Rp. (Juta) | TARGET %     | TARGET Rp. (Juta) |                                        |        |
|        |         | Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, hak reproduksi di Fasilitas Kesehatan KB Pasca salin dan pasca keguguran                         |                                                                                                                                              |                                          | 100                                   | 100               | 100          | 100               | 100          | 100               |                                        |        |
|        |         | Penguatan Kegiatan Penyuluhan , Pergerakan program KKBK untuk Petugas Lapangan KB                                                            |                                                                                                                                              |                                          | 100                                   | 100               | 100          | 100               | 100          | 100               |                                        |        |
|        |         | Penyediaan Sarana Penunjang untuk Penyuluhan , Pergerakan program KKBK untuk Petugas Lapangan KB                                             |                                                                                                                                              |                                          | 100                                   | 400               | 100          | 400               | 100          | 400               |                                        |        |
|        |         | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                                                                                                    | Unmet Need (wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan tetapi tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi); | 7                                        | 7                                     |                   | 6            |                   | 5            |                   |                                        |        |
|        |         | Kegiatan:                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                          |                                       |                   |              |                   |              |                   |                                        |        |
|        |         | Sub Kegiatan:                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                          |                                       |                   |              |                   |              |                   |                                        |        |
|        |         | Pendampingan dan bimbingan pada akseptor KB                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                          | 100                                   | 300               | 100          | 300               | 100          | 300               |                                        |        |
|        |         | Peningkatan Kualitas KB (Pelayanan dan Fasilitas Layanan KB )                                                                                |                                                                                                                                              |                                          | 100                                   | 500               | 100          | 500               | 100          | 500               |                                        |        |
|        |         | Pembinaan dan pergerakan Kader IMP dan Lini Lapangan                                                                                         |                                                                                                                                              |                                          | 100                                   | 100               | 100          | 100               | 100          | 100               |                                        |        |
|        |         | Penyediaan dan distribusi sarana KIE                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                          | 100                                   | 200               | 100          | 200               | 100          | 200               |                                        |        |
|        |         | Penggerakkan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP                                                                                        |                                                                                                                                              |                                          | 100                                   | 100               | 100          | 100               | 100          | 100               |                                        |        |
|        |         | Program Pengendalian Penduduk.                                                                                                               | Indek pembangunan wawasan berkependudukan;                                                                                                   | 1.8                                      | 1.8                                   |                   | 6.4          |                   | 7.2          |                   |                                        |        |
|        |         | Kegiatan:                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                          |                                       |                   |              |                   |              |                   |                                        |        |
|        |         | Pemaduan dan sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian kuantitas Penduduk |                                                                                                                                              |                                          |                                       |                   |              |                   |              |                   |                                        |        |
|        |         | Sub Kegiatan:                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                          |                                       |                   |              |                   |              |                   |                                        |        |
|        |         | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota                                               | Terlaksananya Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota                                 | 1                                        | 100                                   | 100               | 1            | 150               | 1            | 150               |                                        |        |





## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGGARAAN BIDANG URUSAN**

Maksud dari Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 adalah menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif tiga tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PD).

Sedangkan tujuan penyusunan RPD Kota Bekasi adalah :

1. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD Kota Bekasi dalam menentukan prioritas program tahunan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah dan memberikan pemahaman mengenai arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi.
3. Menjamin terciptanya sinkronisasi kebijakan dalam kerangka koordinasi, integritas, dan sinergi kebijakan antar pelaku pembangunan (stakeholders).
4. Menyediakan indikator dan target kinerja untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
5. Memelihara kesinambungan proses dan hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan.

Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi mengacu kepada tujuan dan sasaran Rancangan Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 terdapat dalam tujuan dan sasaran Ke -1 (satu) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akutabel serta dan ke -2 terwujudnya pembangunan manusia dan masyarakat yang berkualitas serta berkeadilan, melalui kesejahteraan keluarga dan pembangunan responsif gender indikator kinerja adalah indek pembangunan keluarga target kinerja pada tahu 2024 sebanyak 51,52%, pada 2025 sebanyak 51,5%, daan pada tahun 2026 sebanyak 53%.

Mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi menetapkan Indikator Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, dinamis dan akutabel dengan cara meningkatnya kualitas manajemen dan kinerja pemerintah dengan indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)
2. Terwujudnya pembagunan manusia dan masyarakat yang berkualitas secara berkeadilan dengan cara meningkatnya kesejahteraan keluarga dan pembangunan responsif gender, indikator kinerja Indeks Pembangunan Keluarga.

**Table 7.1**  
**Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi**  
**Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

| No | Indikator Sasaran                                                                                                                            | Satuan | Kondisi Awal<br>(2024) | Target Kinerja Sasaran |       |       | Target Akhir<br>Rencana<br>Strategis<br>Perubahan |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                              |        |                        | 2024                   | 2025  | 2026  |                                                   |
| 1  | Nilai AKIP                                                                                                                                   | Persen | 75.05                  | 75.05                  | 76    | 77    | 77                                                |
| 2  | Presentasi balita stanting;                                                                                                                  | Persen | 2.9                    | 2.9                    | 2.5   | 2     | 2                                                 |
| 3  | Median usia kawin pertama (MUKP) usia 25-49 Tahun                                                                                            | Persen | 37.25                  | 37.25                  | 37.20 | 37.15 | 37.15                                             |
| 4  | Presentasi peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka (MKJP);                                                                                | Persen | 27                     | 27                     | 27.05 | 27.15 | 27.15                                             |
| 5  | PanjangAngka kelahiran remaja umur 15-19 Tahun (ASFR);                                                                                       | Persen | 11                     | 11                     | 10.5  | 10    | 10                                                |
| 6  | Angka prevalensi kontrasepsi moderen (mCPR);                                                                                                 | Persen | 79.83                  | 79.83                  | 80    | 80.10 | 80.10                                             |
| 7  | Presentasi tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi;                                                                                    | Persen | 27,5                   | 27,5                   | 28    | 28,5  | 28,5                                              |
| 8  | Unmet Need (wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan tetapi tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi); | Persen | 7                      | 7                      | 6     | 5     | 5                                                 |
| 9  | Indek pembangunan wawasan berkependudukan;                                                                                                   | Persen | 1.8                    | 1.8                    | 6.4   | 7.2   | 7.2                                               |
| 10 | Presentasi kampung KB Mandiri;                                                                                                               | Persen | 44                     | 44                     | 47    | 50    | 50                                                |
| 11 | Presentasi masyarakat yang terjangkau program bangga kencana.                                                                                | Persen | 50,52                  | 51                     | 51,05 | 52    | 52                                                |

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi menyusun Rencana Strategis Perubahan 2024-2026 dalam rangka mewujudkan program-program kerja yang direncanakan selama 3 (tiga) tahun. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi pihak yang terkait dan berkepentingan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi. Ruang lingkup Perencanaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi sangat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi 2024-2026.

Rencana Strategis Perubahan ini diharapkan menjadi pedoman rencana operasional kegiatan dan dapat menunjang keberhasilan tujuan dan sasaran Rancangan Pembangunan Daerah Kota Bekasi yang telah ditetapkan selama 3 (tiga) tahun. Rencana Strategis Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang telah dibuat dapat diwujudkan, untuk mencapai tujuan akhir yaitu, mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BEKASI**



**Dra. IKA INDAH YARTI, M.Si.**